

ABSTRAK

Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge Porn* berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya terhadap perempuan. Kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban diperlukan dalam masalah *revenge porn* terutama terhadap korban dalam konsep negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*).

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menegaskan *pertama*, *revenge porn* merupakan pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan beserta keterangannya. *Kedua*, kewajiban dan tanggungjawab negara memberikan perlindungan terhadap korban.

Penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal menggunakan metode pendekatan *juridis normatif* dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa data sekunder (primer, sekunder, dan tersier) yang dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: *Pertama*, *revenge porn* merupakan salah satu pelanggaran HAM melalui media sosial yang disengaja pelaku dan pada umumnya perempuan yang menjadi korban akibat tindakan tersebut. Akibat dari *revenge porn* tersebut, maka banyak hak-hak seseorang yang dilanggar sesuai dengan instrumen yang ada. *Kedua*, kewajiban dan tanggung jawab negara memberikan upaya preventif dan represif terhadap korban dan pelaku yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *revenge porn* kembali.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, Hak Perempuan, Kewajiban Negara

ABSTRACT

Revenge porn is a pornographic revenge done by someone against another person by spreading the victim's pornographic content to social media which aims to bring down the image of the victim. Revenge Porn has developed along with the development of ITE, which has led to human rights violations especially towards women. The obligation and responsibility of the state as the holder of obligations is needed in the matter of revenge porn, especially for victims in the concept of the state obliged to respect, to protect, to fulfill.

The writing of this law aims to assert first, revenge porn is a violation of human rights especially towards women and their statements. Second, the obligations and responsibilities of the state provide protection for victims.

Legal research in this paper is doctrinal research using a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Data obtained from library studies in the form of secondary data (primary, secondary, and tertiary) were analyzed by qualitative data analysis methods.

Based on the results of the study, it is known: First, revenge porn is one of the human rights violations through intentional social media perpetrators and in general women who are victims of these acts. As a result of the revenge porn, many of a person's rights are violated according to existing instruments. Second, the obligations and responsibilities of the state provide preventive and repressive efforts to victims and perpetrators whose aim is to prevent revenge from happening again.

Keywords: Revenge Porn, Women's Rights, State Obligations